



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023**



bkkbn



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**



Jl. M. Natsir – Pasaman Baru , Kec.Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

Telp/Fax : 7464100/7464100 Kode Pos : 26366



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
INSPEKTORAT

Jln. Soekarno Hatta No. 29 Telp.(0753) 466169 Fax. (0753) 466170
Simpang Empat – Pasaman Barat 26566

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPKBP3A)
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Pasaman Barat untuk periode tahun 2023 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Pasaman Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan yang terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Simpang Empat, 28 Maret 2024
INSPEKTUR DAERAH,

EMNITA NADIRUA, SE, MM, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19750831 200604 2 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2023 pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat telah dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Pemerintah merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya. Dengan adanya LKjIP, diharapkan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat dapat menjadi Instansi Pemerintah yang Akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepada seluruh pejabat dan staf yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LKjIP ini disampaikan terima kasih.

Simpang Empat, Maret 2024

Kepala DPPKBP3A



dr. Anna Rahmadia, M.KM

Pembina Tk.I/IV B
NIP. 198209272008052001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan aturan pelaksanaan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target kinerja yang harus dicapai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKJIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2023 telah menetapkan 3 (tiga) Tujuan, 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian kinerja dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022-2023**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
I	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak serta Pemenuhan Hak Anak	Predikat pencapaian KLA	Nindya (720)	Madya (605)	84,02	
		IPG	91,03	90,17	99,05	

		IDG	64,44	61,05	94,73	
		Predikat APE	Madya	Madya	100	
1.1	Terpenuhinya Hak Anak	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	720	605	84	
1.2	Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	3,5	6,3	18	
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0,01	3,09	33	
1.3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif	65,20%	5,2%	7,97	
		Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif	7,50%	7,5%	100,00	
		Persentase besaran anggaran responsive gender terhadap total anggaran Belanja Langsung APBD	4,67%	0,80%	17	
II	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	LPP	1,23%	1,22%	100,81	
		TFR	3,05	2,51	121,5	
2.1	Menurunnya Angka kelahiran pada WUS 15-19 Tahun	ASFR 15-19 Tahun	33	12	275	
2.2	Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern	mCPR	66,50%	53,99%	81,18	
2.3	Meningkatnya kualitas keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	65,0%	10,67%	16,41	
III	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A	Nilai SAKIP DPPKBP3A	B	B	100	
		Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100	
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan DPPKBP3A	75%	100%	133	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	NA	NA	
	Capaian rata-rata kinerja				82,4	

Berdasarkan data table diatas rata-rata nilai capaian kinerja Dinas Pengendalian Pendudu, Keluarga Berencana, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2023 adalah 82,4% dengan kategori Baik.

DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat juga mengalami beberapa kendala dalam pencapaian target kinerjanya sesuai RPJMD, di antaranya adalah sebagai berikut:

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
 - 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
 - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - 1) Belum semua PD melaksanakan PPRG
 - 2) Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan
 - 3) Belum tersedianya data gender dan anak
- c. Permasalahan terkait perlindungan perempuan dan Anak:
 - 1) Tingginya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Belum optimalnya lembaga pelayanan perempuan dan Anak dilihat dari sisi fasilitas dan SDM
- d. Permasalahan terkait Pemenuhan Hak anak:
 - 1) Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).
 - 2) Belum optimalnya capaian skor KLA
 - 3) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak
 - 4) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini
- e. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk
 - 1) Masih Tingginya angka pertumbuhan penduduk
 - 2) Belum meratanya persebaran jumlah penduduk di setiap wilayah
 - 3) Belum semua Nagari/Jorong memiliki data Mikro
 - 4) Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan
- f. Permasalahan terkait Keluarga Berencana
 - 1) Unmetneed tinggi
 - 2) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB
 - 3) Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB
 - 4) Belum optimalnya peran organisasi kemasyarakatan dalam pembinaan kepesertaan KB
 - 5) Masih kurangnya pemahaman tentang kespro dan PUP bagi remaja

g. Permasalahan terkait Keluarga Sejahtera

- 1) Masih ditemukan Keluarga PS dan KS I
- 2) Masih rendahnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan
- 3) Belum optimalnya partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam penggarapan kampung KB
- 4) Belum maksimalnya pelaksanaan percepatan penurunan prevalensi stunting

Untuk menghadapi masalah/kendala yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Menata kembali PLKB dan meningkatkan peran IMP dan Kader;
2. Membentuk kelompok-kelompok PIK remaja dan KIE bagi remaja;
3. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengendalian penduduk, mencakup pengendalian kelahiran dan migrasi penduduk;
4. Mencegah perkawinan usia dini melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), dan melakukan advokasi terhadap PIK dan BKR;
5. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, penyediaan Alat kontrasepsi, meningkatkan promosi dan KIE KB;
6. Mengoptimalkan Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU), kerjasama dengan sekolah dan Perguruan tinggi dalam pengembangan PIK, dan integrasi dengan program yang sudah ada (BKB dengan Posyandu, PAUD).
7. Peningkatkan kerjasama dengan klinik KB baik pemerintah maupun swasta;
8. Mengoptimalkan koordinasi dengan PD dalam pembuatan dokumen PPRG
9. Menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait, seperti organisasi perangkat daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga/Organisasi Masyarakat.
10. Melakukan inovasi dan memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan kualitas layanan.
11. Melakukan Refreshment terkait pemahaman dalam pembelajaran system satu data
12. Melakukan penerapan indikator Kabupaten Layak Anak dalam kegiatan sehari-hari pemerintah kabupaten Pasaman Barat
13. Mengoptimalkan Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU), kerjasama dengan sekolah dan Perguruan tinggi dalam pengembangan PIK, dan integrasi dengan program yang sudah ada (BKB dengan Posyandu, PAUD).

14. Peningkatkan kerjasama dengan klinik KB baik pemerintah maupun swasta;
15. Mengoptimalkan koordinasi dengan PD dalam pembuatan dokumen PPRG
16. Menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait, seperti organisasi perangkat daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga/Organisasi Masyarakat.
17. Melakukan inovasi dan memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan kualitas layanan.
18. Melakukan Refreshment terkait pemahaman dalam pembelajaran system satu data
19. Melakukan penerapan indikator Kabupaten Layak Anak dalam kegiatan sehari-hari pemerintah kabupaten Pasaman Barat

Simpang Empat, Maret 2024
Kepala



dr. Anna Rahmadia, M.KM
Pembina Tk.I/IV B
NIP. 198209272008052001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1. Latar Belakang	1
1. 2. Maksud dan Tujuan	2
1. 3. Gambaran Umum Organisasi.....	2
1. 4. Aspek Strategis dan Isu Strategis.....	16
1. 5. Sistematika Penulisan.....	17
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	 19
2. 1.Perencanaan Strategis 2021-2026.....	19
2. 2. Tujuan dan Sasarn.....	20
2. 3. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	21
2. 4.Perjanjian Kinerja.....	23
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 24
3. 1.Capaian Kinerja Organisasi.....	31
3. 2.Realisasi Anggaran.....	66
3. 3.Penghargaan.....	72
 BAB V PENUTUP.....	 75
LAMPIRAN.....	77

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumber daya manusianya. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal yang disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan yang paling penting menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, maka dipandang perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang salah satunya adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi dan Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) kepada Bupati Pasaman Barat yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2021 – 2026.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKjIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan;
2. Menjadikan Pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif; dan
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Dasar Pembentukan Instansi

Dinas Pengendalian Penduduk merupakan unsur pelaksanaan tugas Pemerintah daerah di Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Pasaman Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah.

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat mempunyai Tugas: **“Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Penyelenggaraan urusan sosial pelayanan umum di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk;
5. Pengendalian angka kelahiran;
6. Pengarahan mobilitas penduduk;
7. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
8. Pembinaan terhadap Koordinator Balai Penyuluhan KB;
9. Pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Mempunyai Tugas:

- a. Membantu kepala daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, yang meliputi perumusan kebijakan daerah serta penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. Memberikan data dan informasi mengenai pelayanan umum di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah sebagai bahan dalam pengambilan keputusan;

- c. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- d. Mempertanggungjawabkan tugas dinas baik teknis operasional maupun fungsional kepada kepala daerah;
- e. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan, loyalitas dan kejujuran;
- f. Membina unsur-unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mengembangkan tugas-tugas dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tata usaha dinas dan pengelolaan unit pelaksana teknis serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional;
- i. Mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu dalam lingkungan dinas;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

2. Sekretariat

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat;

(2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan rencana dan program (KUA PPAS, RKA, dan DPA) dan penyelenggaraan tugas- tugas bidang secara terpadu dan tugas- tugas administratif di lingkungan dinas.

. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program dinas;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta urusan rumah tangga dinas;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- e. Pengoordinasian tugas-tugas bidang dalam penyusunan draf rancangan peraturan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. Pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan, penyimpanan, pendayagunaan dan pengusulan penghapusan aset dinas;

- g. Penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
- l. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas:

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan; dan
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Keuangan dan Aset;

3. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

(1) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

(2) Bidang Keluarga Brencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanadi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai Fungsi:

- a. Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi;
- b. Melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja dibidang Keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi ;
- c. Melaksanakan koordinasi kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
- d. Melaksanakan kerja sama dengan lembaga/ instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- e. Melaksanakan koordinasi,fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- f. Mendorong keikutsertaan Pasangan Usia Subur dalam ber KB.
- g. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dan pendataan terhadap perorangan atau kelompok dalam kegiatan di bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- h. Melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan dan menyusun laporan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi membawahi :

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Kesertaan Keluarga Berencana;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pendataan Kesehatan Reproduksi;
dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan

4. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan

1) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan di Pimpin oleh seorang kepala bidang yang berda dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

2) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan bahan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis dibidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan.

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengkajian perumusan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan dan analisis data evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga sejahtera dan pengendalian kependudukan;
- b. Pelaksanaan pengkajian bahan rencana program kerja di bidang keluarga sejahtera dan pengendalian kependudukan;
- c. Pelaksanaan kebijakan bahan koordinasi di bidang keluarga sejahtera dan pengendalian kependudukan;
- d. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang keluarga sejahtera dan pengendalian kependudukan;
- e. Pelaksanaan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan teknis dan program kerja di bidang keluarga sejahtera dan pengendalian kependudukan;
- f. Pelaksanaan kebijakan bahan kerjasama di bidang keluarga sejahtera dan pengendalian kependudukan;
- g. Penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keluarga sejahtera dan pengendalian kependudukan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Pelaksanaan penyusunan dan analisis data di bidang keluarga sejahtera dan pengendalian kependudukan;
- j. Pelaksanaan pengendalian ketatausahaan di bidang keluarga sejahtera dan pengendalian kependudukan.

- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang keluarga sejahtera dan pengendalian kependudukan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan membawahi:

- 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pembinaan Ekonomi dan Ketahanan Keluarga;
- 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Advokasi dan Pengendalian Penduduk; dan
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Data dan Informasi;

5. Bidang Bina Kelembagaan Perempuan

- (1) Bidang Bina Kelembagaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- (2) Bidang Bina Kelembagaan Perempuan dan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Uraian tugas Kepala Bidang Bina Kelembagaan Perempuan:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana Kegiatan dan Anggaran di Bidang Bina Kelembagaan Perempuan tentang partisipasi, peranan dan pemberdayaan Perempuan serta Bina Kesejahteraan Keluarga dan Organisasi Perempuan.
- b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik dilingkungan Dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang partisipasi, peranan dan pemberdayaan perempuan serta pembinaan Organisasi Perempuan.
- c. Penyelenggaraan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Kelembagaan PUG dan pelaksanaan PUG di daerah.
- d. Melaksanakan penguatan/organisasi, perempuan dan dunia usaha serta pengembangan dan penguatan jaringan kerjanya untuk pelaksanaan PUG.
- e. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG, program dan kegiatan yang responsif Gender skala daerah.
- f. Melaksanakan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi komunikasi informasi dan edukasi PUG di daerah.
- g. Melaksanakan fasilitasi penyediaan data terpilah PUG skala daerah.
- h. Memberikan petunjuk teknis administrasi dan mengarahkan tugas/pekerjaan Sub bidang.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Bina Kelembagaan Perempuan membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pemberdayaan Kelembagaan Perempuan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Data dan Informasi PUG dan Anak; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pengarus Utamaan Gender;

6. Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak

(1) Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;

(2) Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan, pedoman, petunjuk teknis, dan melaksanakan sebagai tugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan dinas maupun dengan lembaga/ instansi terkait;
- c. Penyelenggaraan kebijakan pelaksanaan urusan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- d. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/ instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan di bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
- e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitas dan mediasi pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
- f. Pemberian petunjuk teknis administrasi dan mengarahkan tugas/ pekerjaan di sub bidang;
- g. Pelaksanaan penyuluhan bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, dalam meningkatkan kualitas dan peranserta kaum perempuan dan meningkatkan peran anak dalam pembangunan melalui wadah forum anak;

- h. Pendorong keikutsertaan kaum perempuan dan anak dalam seluruh kegiatan formal dan non formal sebagai perwujudan peran perempuan dan anak dalam pembangunan;
- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap perorangan atau kelompok-kelompok yang diprakarsai oleh kaum perempuan dan anak-anak; dan
- j. Pelaksanaan dan mengordinasikan kegiatan dengan unit terkait;
- k. Pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan DPA;
- l. Pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. Pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala badan dalam upaya peningkatan kualitas hidup dalam perlindungan perempuan dan anak; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Peningkatan Kualitas Keluarga;

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

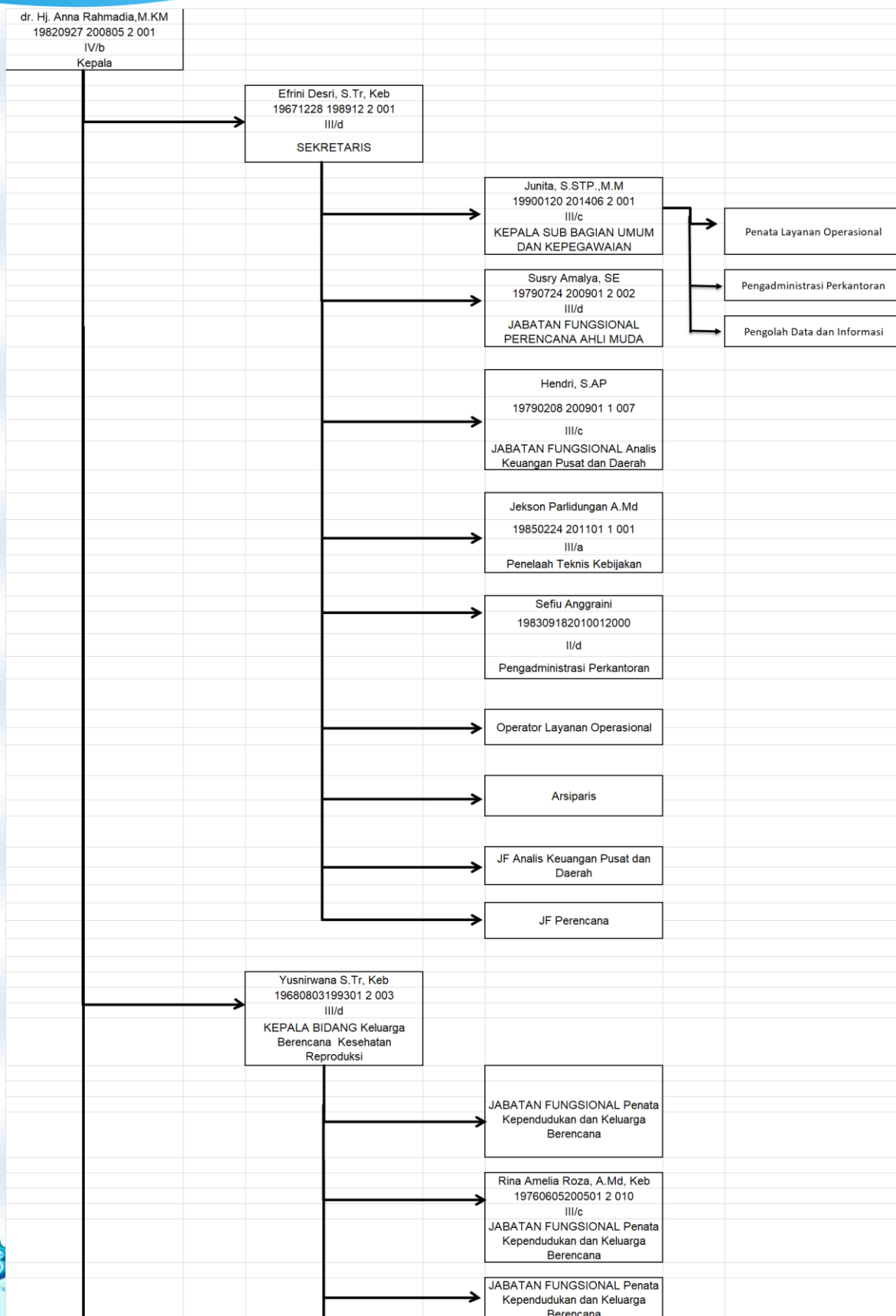
Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk UPTD.

8. Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana

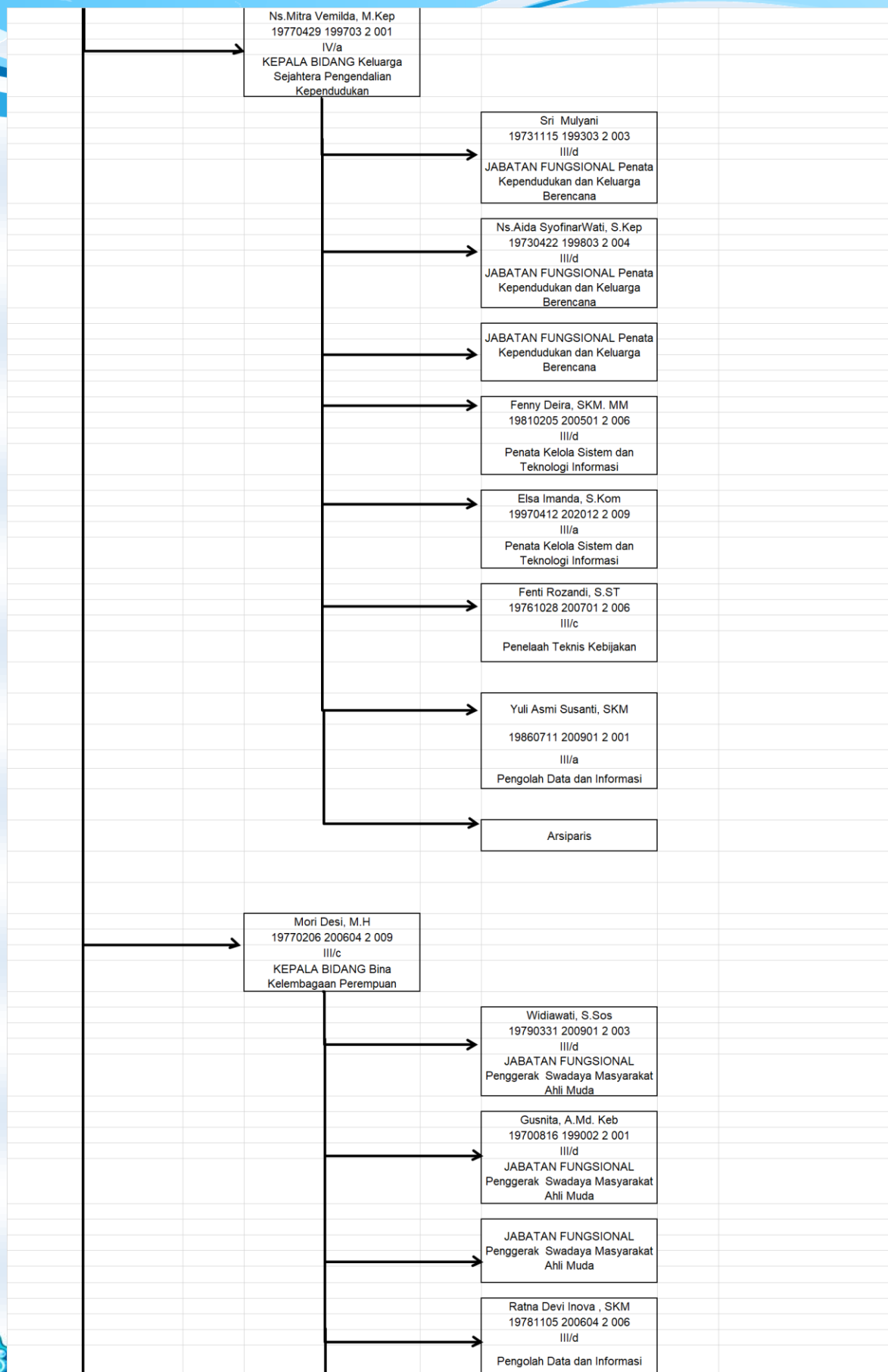
Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dibentuk Koordinator Lapangan (KorLap) untuk melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan; Koordinator Lapangan dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana petugas

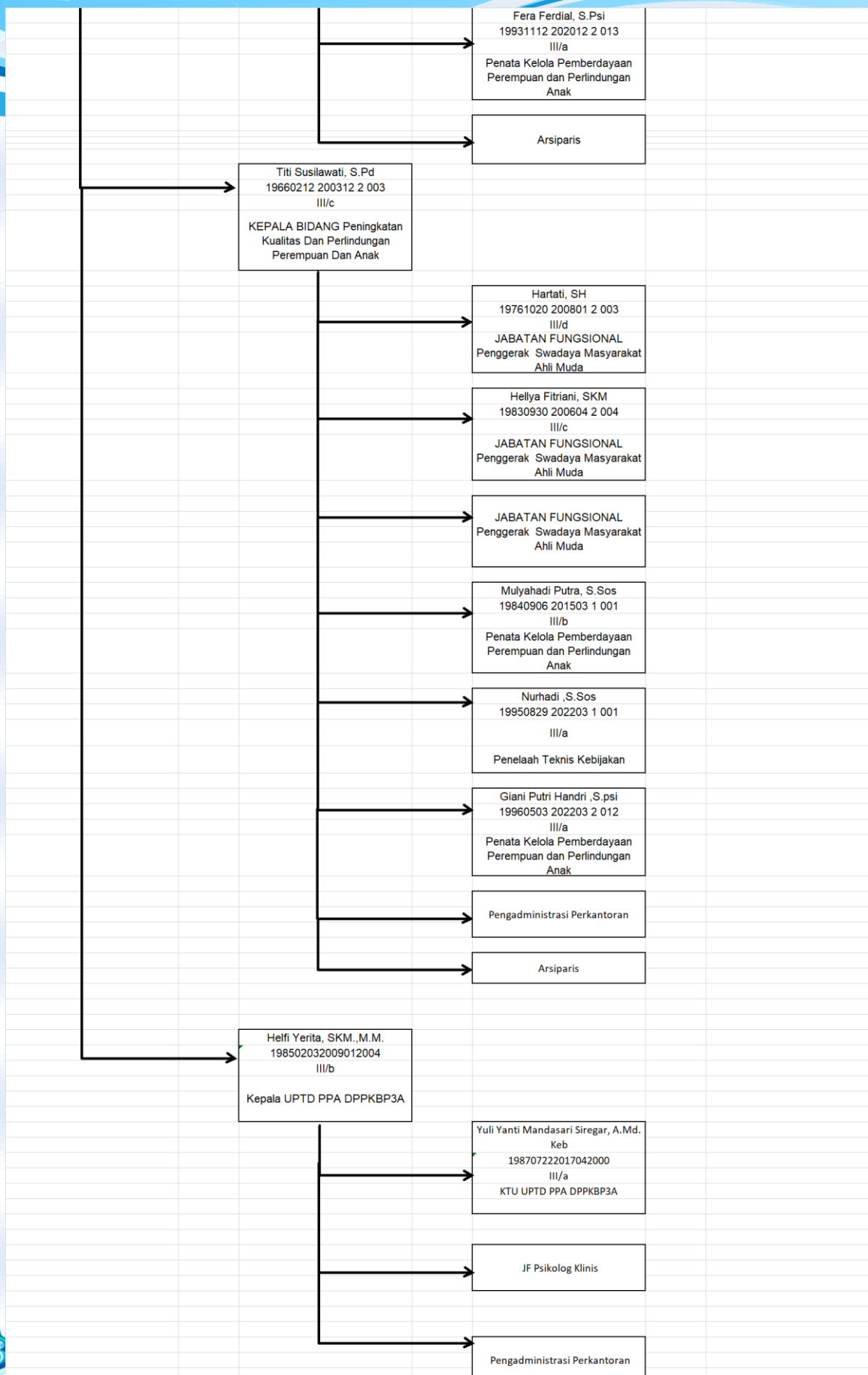
Balai Penyuluh KB di Kecamatan terdiri dari Koordinator, Fasilitator, dan THL Tenaga Keamanan.

STRUKTUR ORGANISASI



					Kasmayanis, A.Md.Keb 19700919 199011 2 001 III/d Penelaah Teknis Kebijakan		
					Afrida Hairani, A.Md.Keb 19710415 199101 2 001 III/d Penelaah Teknis Kebijakan		
					Rina Elita, A.Md.Keb 19710425 199012 2 001 III/d Penelaah Teknis Kebijakan		
					Ely Syahrizi 19700206 199301 2 001 III/d Penelaah Teknis Kebijakan		
					Aufial Hidayat, S.AP 19840611 201001 1 012 III/c Penelaah Teknis Kebijakan		
					Ns. Reni Gusnita HSB, S.Kep 19810818 201001 2 022 III/c Penelaah Teknis Kebijakan		
					Erita Nova, A.Md.Keb 19740714 200604 2 008 III/a Penelaah Teknis Kebijakan		
					Siswanto 19850309 200501 1 002 III/a Pengolah Data dan Informasi		
					Tri Astuti, SKM 198609032009012000 III/d Penelaah Teknis Kebijakan		
					Penelaah Teknis Kebijakan		
					Pengolah Data dan Informasi		
					Pengadministrasi Perkantoran		
					Arsiparis		





1.3.3 Sumber Daya Aparatur

Dalam Menjalankan Tugasnya Tugas dan Fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat didukung oleh 87 PNS, PTT dan THL dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kondisi Kepegawaian DPPKBP3A per Desember 2023

No	Uraian Jabatan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	PTT/THL	Jumlah
1	Kepala	1						1
2	Sekretariat		1	1	2	2	9	15
3	Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		1		2	1	3	7
4	Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk		1		2	3	2	8
5	Bidang Bina Kelembagaan Perempuan		1		2	2	1	6
6	Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak		1		2	3	1	7
7	UPTD P2TP2A			1			2	3
8	Balai Penyuluh KB				12	7	21	40
	Total	1	5	2	22	18	39	87

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak keadaan pada Tahun 2023 adalah sebanyak 85 orang dengan golongan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Pegawai Menurut Golongan Per 31 Desember 2023

No	Uraian Jabatan	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	PTT/THL	Jumlah
1	Kepala				1		1
2	Sekretariat		2	4		9	15
3	Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			4		3	7
4	Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk		1	4	2	1	8
5	Bidang Bina Kelembagaan Perempuan			5		1	6

6	Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak			6		1	7
7	UPTD P2TP2A		1			2	3
8	Balai Penyuluh KB		19			21	40
	Total	0	23	23	3	38	87

Berdasarkan Latar belakang pendidikan aparatur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Data Pegawai Menurut Pendidikan Per 31 Desember 2023

No	Uraian Jabatan	S2	S1	D III	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala	1						1
2	Sekretariat		6	2	6	1	0	15
3	Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		5	1	1			7
4	Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	2	4	1	2			9
5	Bidang Bina Kelembagaan Perempuan	1	4	1				6
6	Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak		6		1			7
7	UPTD P2TP2A	1	1					2
8	Balai Penyuluh KB		40					40
	Total	5	66	5	10	1	0	87

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat memiliki sumber daya manusia dalam jumlah dan kapasitas yang kurang memadai. DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat mempunyai 87 orang pegawai, terdiri dari ASN 49 Orang (ASN Pusat 12 dan ASN Daerah 37 orang) ASN Pusat yang sebanyak 12 orang tersebut adalah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Pegawai PTT/THL sebanyak 38 Orang yang ditugaskan di Kantor DPPKBP3A sebanyak 16 orang dan di 11 Balai Penyuluh KB yang ada di kecamatan sebanyak 22 Orang.

Berdasarkan komposisi diatas DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat masih kekurangan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana untuk melaksanakan penyuluhan dilapangan, dimana idealnya 1 orang PKB per Nagari, namun sekarang ini baru ada 1 orang PKB per Kecamatan, hal ini menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dari PKB tersebut mengingat wilayah kerjanya yang sangat luas sehingga tidak dapat terlayani semuanya.

Untuk tahun 2023 sudah dibentuk UPTD P2TP2A yang merupakan unit yang melayani pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dimana untuk tenaga personilnya

juga masih kurang, saat ini baru ada 1 orang kepala UPTD, 1 Orang Tenaga Administrasi (THL) dan 1 orang Sopir (THL).

Untuk melayani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak DPPKBP3A memerlukan tenaga Psikolog Klinis yang saat ini belum ada, dan jika ada kasus kita harus mendatangkan tenaga psikolog dari Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat memiliki beberapa sarana dan prasarana pendukung, yaitu :

1. Kantor Balai Penyuluh KB di masing – masing kecamatan sebanyak 11 gedung bangunan.
2. Mobil Unit Penerangan KB sebanyak 2 unit.
4. Mobil Akseptor dalam rangka pelayanan KB sebanyak 1 unit.
5. Sepeda Motor sebanyak 11 unit yang dipakai dalam rangka Pelayanan KB.
6. Gudang Alat Kontrasepsi, 1 unit.
7. Kantor UPT P2TP2A 1 Unit
8. Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak 1 Unit

1.4 Aspek Strategis dan Isu Strategis

Permasalahan utama atau isu strategis merupakan merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat antara lain:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
- 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
- 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:

- 1) Belum semua PD melaksanakan PPRG
- 2) Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan
- 3) Belum tersedianya data gender dan anak

c. Permasalahan terkait perlindungan perempuan dan Anak:

- 1) Tingginya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 2) Belum optimalnya lembaga pelayanan perempuan dan Anak dilihat dari sisi fasilitas dan SDM

d. Permasalahan terkait Pemenuhan Hak anak:

- 1) Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).
- 2) Belum optimalnya capaian skor KLA
- 3) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak
- 4) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini

e. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk

- 1) Masih Tingginya angka pertumbuhan penduduk
- 2) Belum meratanya persebaran jumlah penduduk di setiap wilayah
- 3) Belum semua Nagari/Jorong memiliki data Mikro
- 4) Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan

f. Permasalahan terkait Keluarga Berencana

- 1) Unmetneed tinggi
- 2) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB
- 3) Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB
- 4) Belum optimalnya peran organisasi kemasyarakatan dalam pembinaan kepesertaan KB
- 5) Masih kurangnya pemahaman tentang kespro dan PUP bagi remaja

g. Permasalahan terkait Keluarga Sejahtera

- 1) Masih ditemukan Keluarga PS dan KS I
- 2) Masih rendahnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan
- 3) Belum optimalnya partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam penggarapan kampung KB
- 4) Belum maksimalnya pelaksanaan percepatan penurunan prevalensi stunting

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian dalam Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat ini adalah sebagai berikut:

1. **Pendahuluan**, berisi penjelasan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, Gambaran Umum Organisasi serta Aspek strategis dan Isu Strategis

2. **Perencanaan Kinerja**, Berisikan Sasaran Strategis Dan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat;

3. **Akuntabilitas Kinerja**, Berisi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), evaluasi dan analisis dari capaian IKU, akuntabilitas keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Serta Kinerja Lainnya;

4. **Penutup**, berisikan kesimpulan dari akuntabilitas kinerja yang ada di Badan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah disusun.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2021-2026

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026. Renstra ini merupakan acuan dan arahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana periode Tahun 2016-2021 secara menyeluruh, terintegrasi, dan bersinergis baik dalam bidang-bidang yang ada di DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat maupun dengan Instansi teknis terkait.

Renstra DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan selama lima tahun ke depan (2021- 2026). Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan termasuk isu strategis terkini yang dihadapi dalam pembangunan perekonomian perempuan lima tahun ke depan. Renstra DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat 2021 - 2026 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat 2021 - 2026 tentang pembangunan berwawasan kependudukan dan responsive gender di Kabupaten Pasaman Barat.

Sesuai dengan reformasi dalam perencanaan dan sistem penganggaran berbasis kinerja (*Performance-Based Budgeting*), dokumen Renstra dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga akuntabilitas pelaksana kegiatan beserta organisasinya dapat dievaluasi.

Sesuai dengan Visi Bupati Pasaman Barat terpil “ Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”, terdapat tiga misi dalam mewujudkan visi tersebut. Misi yang diusung oleh Kepala Daerah terpilih dalam Rencana Pembangunan Periode 2021-2026 yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan, yang profesional dan inovatif;
2. Membangun Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya dan berdaya saing;
3. Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif

Berdasarkan telaahan terhadap Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdapat pada dokumen RPJMD 2021-2026, memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan secara langsung Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana terutama mendukung pencapaian **Misi ke 1** yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif untuk mencapai sasaran 1. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta **Misi ke 2** yaitu ***Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing*** Dengan menfokuskan pada tujuan 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk mencapai sasaran 3. Terwujudnya penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas. **Misi 3 Mewujudkan Perekonomian yang tangguh dan berdaya saing** dengan memfokuskan pada Tujuan 4. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan dengan sasaran 4.1 Pengentasan Kemiskinan dengan 4 (Empat) indikator utama, yakni:

- 1) Indeks Pembangunan Gender (IPG) ditargetkan mencapai 92 pada tahun 2026.
- 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ditargetkan mencapai 68 pada tahun 2026.
- 3) Predikat Kabupaten Layak Anak ditargetkan mencapai 820 (Utama) pada tahun 2026.
- 4) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) ditargetkan mencapai 1,12 pada tahun 2026.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak serta Pemenuhan Hak Anak
- b. Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk
- c. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A

Sasaran yang akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya Hak Anak;
- b. Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- c. Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- d. Menurunnya Angka kelahiran pada Wanita usia Subur 15-19 Tahun
- e. Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern;
- f. Meningkatnya Kualitas Keluarga; dan
- g. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A.

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja tyang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi yaitu :

1. Indikator Masukan (*Input*) adalah menunjukkan segala sesuatu diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (*Output*) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi, dan lain-lain.
2. Indikator Proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran dan menggambarkan perkembangan atau aktivitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran
3. Indikator Keluaran (*Output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik
4. Indikator Hasil (*Outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
5. Indikator Manfaat (*Benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan
6. Indikator Dampak (*Impact*) adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Untuk mencapai sasaran strategis instansi ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana daftar berikut ini:

**Tabel. 2.1 Indikator Kinerja Utama
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian Setiap Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak serta Pemenuhan Hak Anak	Predikat pencapaian KLA	Madya (620)	Madya (650)	Nindya (720)	Nindya (750)	Nindya (780)	Utama (820)
		IPG	90,38	90,71	91,03	91,35	91,68	92
		Predikat APE	Pratama (1)	Madya (2)	Madya (2)	Madya (2)	Madya (2)	Utama (3)
		IDG	62,07	63,25	64,44	65,63	66,81	68
	Terpenuhinya Hak Anak	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	620	650	720	750	780	820
	Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	5,8	4,7	3,5	2,3	1,2	0
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0
2.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif	64,79	65	65,2	65,4	65,6	66
		Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif	7,5	7,5	7,5	30	30	30
		Persentase besaran anggaran responsive gender terhadap total anggaran Belanja Langsung APBD	4,63	4,65	4,67	8	9	12
3.	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	LPP	1,25	1,24	1,23	1,22	1,21	1,2
		TFR	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3
	Menurunnya Angka kelahiran pada Wanita usia Subur 15-19 Tahun	ASFR 15-19 Tahun	35	34	33	32	31	30
	Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern	mCPR	66	66,25	66,5	66,75	67	68
	Meningkatnya kualitas keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	60	63	65	70	72	75

4.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	B
		Level Maturitas SPIP	NA	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan DPPKBP3A	50%	50%	75%	75%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	70%	75%	80%	85%	90%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A	Nilai SAKIP DPPKBP3A	B	B	B	BB	BB	BB
		Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan DPPKBP3A	50%	50%	75%	75%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	70%	75%	80%	85%	90%	100%

2.4 Perjanjian Kinerja

Pada dasarnya rencana kinerja (*performance plan*) Tahun 2023 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat selama Tahun 2023. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 2023 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan mapupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategi merupakan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian Visi dan Misi. Rencana kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 secara lengkap disajikan pada Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja DPPKBP3A 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Tahun 2023
I	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak serta Pemenuhan Hak Anak	Predikat pencapaian KLA	Nindya
		IPG	91,03

		IDG	64,44
		Predikat APE	Madya
1.1	Terpenuhinya Hak Anak	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	720 Nilai
1.2	Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	3.5 Rasio
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0.01 Rasio
1.3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif	65.2 Persen
		Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif	7.5 Persen
		Persentase besaran anggaran responsive gender terhadap total anggaran Belanja Langsung APBD	4.67 Persen
II	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	LPP	1,23
		TFR	3,05
2.1	Menurunnya Angka kelahiran pada WUS 15-19 Tahun	ASFR 15-19 Tahun	33 Rasio
2.2	Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern	mCPR	66.5 %
2.3	Meningkatnya kualitas keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	65%
III	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A	Nilai SAKIP DPPKBP3A	B
		Level Maturitas SPIP	Level 3 Level
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan DPPKBP3A	75 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2023, DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat menyelenggarakan 10 Program dengan anggaran sebesar Rp 10.766.453.944,- yang terdiri dari dana DAU, DAK Non Fisik Keluarga Berencana dan DAK Fisik Bidang Keluarga Berencana. Untuk Tahun 2023 DPPKBP3A mendapatkan Dana DAK Non Fisik (BOKB) sebesar Rp 4.242.735.000,- dan dana DAK Fisik Bidang Keluarga Berencana sebesar Rp 226.757.000,-

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran berdasarkan Program DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2023

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE REALISASI (%)
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.957.555.254	3.984.253.886	80,37
2	Program Pengendalian Penduduk	288.027.000	184.578.194	64,08
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.539.655.750	2.163.931.150	85,21
4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.996.600.000	1.776.743.800	88,99
5	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	651.390.750	544.207.390	83,55
6	Program Perlindungan Perempuan	42.750.000	18.157.000	42,47
8	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	37.765.200	37.400.500	99,03
9	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	96.109.350	92.980.721	96,74
10	Program Perlindungan Khusus Anak	156.600.640	133.405.273	85,19
	JUMLAH ANGGARAN	10.766.453.944	8.935.657.914	83,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggung jawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN, Bantuan Luar Negeri, dan sumber dana lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2023, yang ditujukan kepada Bupati Pasaman Barat, dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perempuan Kabupaten Pasaman Barat secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, dan terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan lakip yaitu diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian kinerja DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama DPPKBP3A dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara kepala dengan Bupati Pasaman Barat. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Perhitungan capaian kinerja didapat dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Target}) \times 100\%$$

Untuk menilai ketercapaian kinerja digunakan klasifikasi penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Interval predikat capaian kinerja DPPKBP3A disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Skala Penilaian Capaian Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤50%	Sangat Rendah

Tujuan dan Sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023 merupakan rangkaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026 , adapun sasaran, indikator dan capaian kinerja DPPKBP3A Tahun 2023 diuraikan dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja DPPKBP3A Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Pencapaian Kinerja	Predikat
I	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak serta Pemenuhan Hak Anak	Predikat Pencapaian KLA	Nindya (720)	Madya (605)	84,02%	Tinggi
		IPG	91,03	90,17	99,05	Sangat Tinggi
		IDG	64,44	61,05	94,73	Sangat Tinggi
		Predikat APE	Madya	Pratama	50	Rendah
1.1	Terpenuhinya Hak Anak	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	720	605	84	Tinggi
1.2	Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	3,5	6,3	18	Sangat Rendah
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0,01	3,09	33	Sangat Rendah
1.3	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan	Keterwakilan perempuan sebagai pengambil	65,20%	5,2%	7,97	Sangat Rendah

	Pemberdayaan Perempuan	keputusan di lembaga eksekutif				
		Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif	7,50%	7,5%	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase besaran anggaran responsive gender terhadap total anggaran Belanja Langsung APBD	4,67%	0,80%	17	Sangat Rendah
II	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,23%	1,22%	100,81	Sangat Tinggi
		TFR	3,05	2,51	121,5	Sangat Tinggi
2.1	Menurunnya Angka kelahiran pada Wanita usia Subur 15-19 Tahun	ASFR 15-19 Tahun	33	12	275	Sangat Tinggi
2.2	Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern	mCPR	66,50%	53,99%	81,18	Tinggi
2.3	Meningkatnya kualitas keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	65,0%	10,67%	16,41	Sangat Rendah
VII	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A	Nilai SAKIP DPPKBP3A	B	B	100	Sangat Tinggi
		Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100	Sangat Tinggi
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan DPPKBP3A	75%	100%	133	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	NA	NA	

Pada tabel dibawah adalah perbandingan capaian pada 2 (dua) tahun terakhir pada level tujuan dan sasaran atau Indikator Kinerja Utama DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2022 - 2023.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja DPPKBP3A Tahun 2022-2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
I	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak serta	Predikat pencapaian KLA	Nindya (720)	Madya (605)	Nindya	Madya

	Pemenuhan Hak Anak					
		IPG	91,03	90,17	90,71	90,17
		IDG	64,44	61,05	63,25	61,05
		Predikat APE	Madya	Pratama	Madya	Madya
1.1	Terpenuhinya Hak Anak	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	720 Nilai	605 Nilai	650 Nilai	649,2 Nilai
1.2	Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	3.5 Rasio	6,3 Rasio	3.5 Rasio	10,3 Rasio
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0.01 Rasio	3,09	0.01 Rasio	2,54
1.3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif	65.2 Persen	5,20 Persen	65.2 Persen	4,73 Persen
		Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif	7.5 Persen	7.5 Persen	7.5 Persen	7,5 Persen
		Persentase besaran anggaran responsive gender terhadap total anggaran Belanja Langsung APBD	4.67 Persen	0,8 Persen	4.67 Persen	0,19 Persen
II	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	LPP	1,23	1,22	1,24	1,41
		TFR	3,05	2,51	3,05	3,05
2.1	Menurunnya Angka kelahiran pada WUS 15-19 Tahun	ASFR 15-19 Tahun	33 Rasio	12 Ratio	33 Ratio	34 Ratio
2.2	Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern	mCPR	66.5 %	54,80%	66,25%	65,53%
2.3	Meningkatnya kualitas keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	65%	10,67%	65%	21,70%
III	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A	Nilai SAKIP DPPKBP3A	B	B	B	B
		Level Maturitas SPIP	Level 3 Level		Level 3 Level	
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan DPPKBP3A	75 %	100%	75 %	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80	NA	NA	NA

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja sd Tahun 2023	% Pencapaian Kinerja
I	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak serta Pemenuhan Hak Anak	Predikat pencapaian KLA	Utama (820)	Madya (605)	73,78
		IPG	92	90,17	98,01
		IDG	68	61,05	89,77
		Predikat APE	Utama	Pratama	25
1.1	Terpenuhinya Hak Anak	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	>800	605	75,63
1.2	Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0	6,37	0,00
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0	3,09	0,00
1.3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif	66%	12,00%	18,18
		Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif	30%	7,5%	25,00
		Persentase besaran anggaran responsive gender terhadap total anggaran Belanja Langsung APBD	12%	0,80%	6,67
II	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	LPP	1,2	1,22	100
		TFR	3	2,51	119,52
2.1	Menurunnya Angka kelahiran pada WUS 15-19 Tahun	ASFR 15-19 Tahun	30%	34,00%	88,24
2.2	Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern	mCPR	68%	54,80%	80,59
2.3	Meningkatnya Jumlah Keluarga yang ikut BKB	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	75,0%	21,7%	28,93
III	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A	Nilai SAKIP DPPKBP3A	BB	B	75,00
		Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100,00
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan DPPKBP3A	100%	100%	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	NA	NA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tujuan 1 Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak serta Pemenuhan Hak Anak

Adapun indikator kinerja untuk pengukuran keberhasilan dari Tujuan 1 Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak serta Pemenuhan Hak Anak adalah sebagai berikut:

1. Predikat Pencapaian KLA

- Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.5
Predikat Pencapaian KLA
Tahun 2023

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	Predikat Pencapaian KLA	Nindya (720)	Madya (605)	84,02	Tinggi

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Menghadapi tantangan terhadap upaya mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak, upaya yang dilakukan adalah dengan upaya mengembangkan Kabupaten Layak Anak melalui pendekatan Bottom up, dengan mandatnya terbagi atas 5 kluster substansi. Kluster I terkait hak sipil dan kebebasan. Kluster II terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Kluster III terkait kesehatan dasar dan kesejahteraan. Kluster IV terkait pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Kluster V terkait perlindungan khusus anak. Kabupaten Pasaman Barat berturut turut dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 telah berhasil meraih kategori Madya dalam penilaian Kabupaten Layak Anak secara Nasional.

- **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022**

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Predikat Pencapaian KLA
Tahun 2022-2023

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Predikat pencapaian KLA	Nindya (720)	Madya (605)	Madya (650)	Madya (649,2)

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Dilihat dari table diatas pencapaian Predikat KLA Tahun 2023 dan 2022 sama-sama mendapatkan Predikat Madya, tetapi terjadi penurunan nilai dari 649,2 menjadi 605 dan nilai ini merupakan hasil verifikasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

- **Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2026**

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Predikat Pencapaian KLA Tahun 2023
dengan Target Renstra Tahun 2026

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja sd Tahun 2023	% Pencapaian Kinerja
1	Predikat pencapaian KLA	Utama (820)	Madya (605)	73,78

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Predikat Pencapaian KLA yang ditargetkan pada tahun 2026 mendapat predikat Utama (820) baru tercapai Madya (605) atau 73,78%

- **Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Provinsi Sumatera Barat**

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Predikat Pencapaian KLA Tahun 2023
dengan Capaian Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Provinsi Tahun 2023
1	Predikat pencapaian KLA	Madya (605)	KLA (Provila)

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Provinsi Sumatera Barat untuk pertama kalinya meraih peringkat Propinsi Layak Anak (Provila) tentu saja ini didukung oleh capaian dari Kabupaten/ kota di Sumatera Barat. penghargaan KLA kategori Utama diraih oleh Kota Padang, Kota Sawahlunto dan Kota Padang Panjang. Sedangkan predikat kategori Nindya diraih Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kabupaten Agam serta 12 kabupaten/kota lainnya memperoleh peringkat Madya dan Pratama yang salah satunya Kabupaten Pasaman Barat dengan kategori madya.

- **Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Capaian ini dapat diraih berkat kerjasama dan kerja keras semua instansi terkait, dan tentu saja harus didukung dengan anggaran yang memadai di DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat maupun di seluruh lintas sektor dan lintas vertikal yang ada di Kabupaten Pasaman Barat yang tujuannya untuk mengupayakan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan generasi emas di Kabupaten Pasaman Barat.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).
2. Belum optimalnya capaian skor KLA
3. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak
4. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini

Solusi yang akan dilakukan untuk Pencapaian Kinerja:

1. Mengoptimalkan Pemenuhan Hak Anak dan Pelaksanaan Pengarusutmaan Hak Anak (PUHA) dengan meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait.
2. Meningkatkan capaian skor KLA dengan memenuhi dengan maksimal kriteri-kriteria penilaian
3. Mengoptimalkan Sekolah Ramah Anak
4. Mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini

- **Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Adapun Program/Kegiatan penunjang pencapaian kinerja ini adalah Program Pemenuhan Hak Anak dengan Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang terdiri dari dua sub kegiatan yaitu:

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 23.525.000 terealisasi sebesar Rp22.838.700 atau (97,08%)
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 72.584.35 dengan realisasi Rp 70.142.021 atau sebesar 96,64%

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

- Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.9
Target dan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Tahun 2023

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,03	90,17	99,05	Sangat Tinggi

Sumber: Website Badan Pusat Statistik (BPS)

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pencapaian pembangunan manusia yang sama seperti IPM. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Komponen penyusun IPG terdiri dari dimensi Pendidikan (Rata-Rata Lama Sekolah), Kesehatan (Angka Harapan Hidup) dan Ekonomi (Perkiraan Pendapatan laki-laki dan perempuan).

Pada tahun 2023 angka IPG Pasaman Barat ditargetkan 91,03 dan terealisasi 90,17 atau sebesar 99,05% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi.

- **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022**

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Tahun 2022-2023

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,03	90,17	90,71	90,17

Sumber: Website Badan Pusat Statistik (BPS)

Jika dilihat dari Angka IPG Kabupaten Pasaman Barat dari Tahun 2022 dan tahun 2023 masih berada pada angka yang sama, karena angka IPG tahun 2023 masih memakai data IPG Tahun 2022 karena belum tersedianya data terbaru untuk tahun 2023, namun bila dibandingkan dengan Tahun 2021 IPG Kabupaten Pasaman Barat meningkat dari 90,14 menjadi 90,17 pada Tahun 2022/2023

- **Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2026**

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2023
dengan Target Renstra Tahun 2026

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja sd Tahun 2023	% Pencapaian Kinerja
1	IPG	92	90,17	98,01

Sumber: Website Badan Pusat Statistik (BPS)

Angka IPG Kabupaten Pasaman Barat yang ditargetkan pada Tahun 2026 pada angka 92 terealisasi sampai tahun 2023 dengan angka 90,17 atau sebesar 98,01%.

- **Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat**

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Tahun 2023 dengan Capaian Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	2021	2022	2023
1	IPG Nasional	91,27	91,63	91,63
2	IPG Sumatera Barat	94,34	94,72	94,72
3	IPG Pasaman Barat	90,17	90,14	90,14

Sumber: Website Badan Pusat Statistik (BPS)

IPG Kabupaten Pasaman Barat masih berada dibawah IPG Nasional dengan angka 91,63 dan IPG Provinsi Sumatera Barat pada angka 94,72. Untuk Kabupaten/Kota di Sumatera Barat IPG Kabupaten Pasaman Barat berada di peringkat 17, untuk angka IPG tertinggi yaitu Kota Bukittinggi dengan angka 99,36 dan terendah adalah Kabupaten Dharmasraya yaitu dengan angka 88,6.

- **Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

Masih tingginya ketimpangan gender baik di bidang pendidikan, kesehatan dan Pendapatan, karena sebagian masyarakat masih menganggap sumberdaya perempuan masih rendah disbanding laki-laki.

Solusi yang akan dilakukan untuk Pencapaian Kinerja:

Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengarusutamaan gender dengan memberikan KIE kepada Tokoh-tokoh masyarakat dan alim ulama supaya bisa langsung menyampaikan pesan-pesan terkait pengarusutamaan gender ke masyarakat.

- **Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Adapun Program/Kegiatan penunjang pencapaian kinerja ini adalah:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan kegiatan :

- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan pagu anggaran Rp 68.280.75 Dan terealisasi sebesar Rp 37.288.000 (54,61%)
 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi dengan Pagu anggaran Rp 572.010.000 Dan terealisasi sebesar Rp 506.919.390 (88,62%)
2. Program Pengelolaan Data Gender dan Anak dengan Pagu anggaran Rp 37.765.200 Dan teralisasi sebesar Rp 37.400.50 (99,03%)

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

- Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.13
Target dan Capaian Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Tahun 2023

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,44	61,05	94,73	Sangat Tinggi

Sumber: Website Badan Pusat Statistik (BPS)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dibentuk dari 3 (tiga) komponen, yakni Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan, tingkat keterwakilan di lembaga legislatif, dan keterwakilan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pasaman Barat yang ditargetkan pada tahun 2023 pada angka 64,44 tercapai pada angka 61,05 atau 94,73%, namun untuk angka tahun 2023 masih menggunakan angka tahun 2022 karena belum ada publikasi data terbaru dari Badan Pusat Statistik.

- **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022**

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Tahun 2022-2023

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	64,44	61,05	63,25	61,05

Sumber: Website Badan Pusat Statistik (BPS)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pasaman Barat meningkat dari 60,38 pada Tahun 2021 menjadi 61,05 pada Tahun 2022, untuk tahun 2023 angka IDG masih menggunakan angka tahun 2022 yaitu 61,05 karena belum ada publikasi untuk data tahun 2023.

- **Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2026**

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2023
dengan Target Renstra Tahun 2026

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja sd Tahun 2023	% Pencapaian Kinerja
1	IDG	68	61,05	89,77

Sumber: Website Badan Pusat Statistik (BPS)

Angka IDG Kabupaten Pasaman Barat yang ditargetkan pada Tahun 2026 pada angka 68 terealisasi sampai tahun 2023 dengan angka 61,05 atau sebesar 89,77%.

- **Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat**

Tabel 3.16

**Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Tahun 2023 dengan Capaian Nasional dan Provinsi Sumatera Barat**

No	Uraian	2021	2022	2023
1	IDG Nasional	76,26	76,59	76,59
2	IDG Sumatera Barat	65,12	65,48	65,48
3	IDG Pasaman Barat	60,38	61,05	61,05

Sumber: Website Badan Pusat Statistik (BPS)

Angka IDG Kabupaten Pasaman Barat masih dibawah angka IDG Provinsi Sumatera Barat dengan angka 65,48 dan Nasional dengan angka 76,59. Untuk Kabupaten Kota se Sumatera Barat Kabupaten Pasaman Barat berada pada peringkat 9 (Sembilan) dengan angka tertinggi adalah Kota Payakumbuh dengan angka 71,21 dan angka terendah adalah Kabupaten Padang Pariaman yaitu dengan angka 47,01. Hal ini menggambarkan perbaikan pada peran perempuan dalam pembangunan, baik yang dinilai dari partisipasi di dunia kerja, keterwakilan di lembaga legislatif, maupun di lembaga eksekutif. IDG dibentuk dari 3 (tiga) komponen, yakni Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan, tingkat keterwakilan di lembaga legislatif, dan keterwakilan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif. Jika dilihat lebih dekat, peningkatan capaian IDG lebih banyak disumbang oleh keterwakilan perempuan di lembaga eksekutif dan legislatif.

- **Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama partisipasi dalam angkatan kerja, perempuan dilembaga eksekutif dan legislatif.

4. Predikat Anugrah Parahita Ekapraya (APE)

- Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.17
Target dan Capaian Kinerja Predikat Anugrah Parahita Ekapraya (APE)
Tahun 2023

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	APE	Madya	Pratama	50%	Rendah

Sumber: olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Anugrah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah atas keberhasilan dan prakarsa dalam pencapaian pembangunan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah. Penilaian ini didasarkan pada evaluasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender (PUG) yang terdiri dari 3 (tiga) komponen, meliputi kelembagaan PUG, penyelenggaraan PUG dan inovasi dalam mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan dan/atau peningkatan kualitas keluarga.

Predikat APE mencerminkan perbaikan di bidang kelembagaan dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG), pendanaan, kerjasama, kemitraan dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha, kemitraan dengan media, dukungan anggaran dan kebijakan, serta inovasi.

Predikat APE yang ditargetkan dengan Predikat Madya pada tahun 2023 baru tercapai dengan Predikat Pratama.

- Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tabel 3.18
Perbandingan Capaian Kinerja Predikat Anugrah Parahita Ekapraya (APE)
Tahun 2022-2023

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
1	APE	Madya	Pratama	Madya	Madya

Sumber: olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Pada Tahun 2021, untuk pertama kalinya Kabupaten Pasaman Barat berhasil lolos mengikuti verifikasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dan langsung mendapatkan predikat Madya. Pencapaian ini dipengaruhi oleh perbaikan pada beberapa indikator yang berkaitan dengan implementasi pembangunan yang berpihak kepada kelompok rentan, terutama kaum perempuan dan anak.

Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) ini dilakukan dua tahun sekali, yaitu pertama kali penilaian dilaksanakan pada tahun 2021 dengan Predikat Madya, namun pada tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan Predikat Pratama dimana turun dari tahun 2021, hal ini disebabkan oleh belum terbentuknya UPTD P2TP2A di Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan salah satu factor utama penilaian APE ini, selain itu kriteria penilaian dan aplikasi yang digunakan berbeda dengan Tahun 2021, sehingga pada umumnya Kabupaten/Kota di Indonesia mengalami penurunan Predikat Capaian APE, termasuk salah satunya Kabupaten Pasaman Barat.

- **Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2026**

Tabel 3.19
Perbandingan Capaian Predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2026

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja sd Tahun 2023	% Pencapaian Kinerja
1	APE	Utama	Pratama	35%

Sumber: olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

- **Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat**

Tabel 3.20
Perbandingan Capaian Kinerja Capaian Predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2023 dengan Capaian Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	2022	2023
1	APE Sumatera Barat	65,48	65,48
2	APE Pasaman Barat	61,05	61,05

Sumber: olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

- **Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya fungsi kelembagaan PUG di Kabupaten Pasaman Barat dalam pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang responsive Gender
- Belum Optimalnya dukungan dana untuk pendampingan OPD dalam penyusunan PPRG

Adapun solusi yang dilaksanakan dalam peningkatan capaian indikator APE adalah:

- Melaksanakan strategi pembangunan dengan memberdayakan semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan agar keluar dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka yang berujung pada peningkatan perekonomian negara.
- Melaksanakan pendampingan kepada PD dalam penyusunan PPRGj

Sasaran 1 Terpenuhi Hak Anak

Adapun indikator sasaran Terpenuhi Hak Anak adalah Total Skor Pemenuhan Hak Anak

Total Skor Pemenuhan Hak Anak adalah dasar dari penilaian Predikat KLA

- **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 3.21
Total Skor Pemenuhan Hak Anak
Tahun 2023

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	Total Skor Pemenuhan Hak Anak	(720)	(605)	84,02	Tinggi

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Menghadapi tantangan terhadap upaya mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak, upaya yang dilakukan adalah dengan upaya mengembangkan Kabupaten Layak Anak melalui pendekatan Bottom up, dengan mandatnya terbagi atas 5 kluster substansi. Kluster I terkait hak sipil dan kebebasan. Kluster II terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Kluster III terkait kesehatan dasar dan kesejahteraan. Kluster IV terkait pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan

budaya. Kluster V terkait perlindungan khusus anak. Kabupaten Pasaman Barat berturut turut dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 telah berhasil meraih kategori Madya dalam penilaian Kabupaten Layak Anak secara Nasional dengan Total skor pemenuhan Hak Anak 605.

- **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022**

Tabel 3.22
Perbandingan Capaian Total Skor Pemenuhan Hak Anak
Tahun 2022-2023

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Total Skor Pemenuhan Hak Anak	(720)	(605)	(650)	(649,2)

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Dilihat dari table diatas Total Skor Pemenuhan Anak turun pada tahun dari 649,2 ditahun 2022 menjadi 605 di tahun 2023.

- **Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2026**

Tabel 3.23
Perbandingan Capaian Total Skor Pemenuhan Hak Anak Tahun 2023
dengan Target Renstra Tahun 2026

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja sd Tahun 2023	% Pencapaian Kinerja
1	Total Skor Pemenuhan Hak Anak	(820)	(605)	73,78

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Total Skor Pemenuhan Anak yang ditargetkan pada tahun 2026 dengan skor (820) baru tercapai dengan skor (605) atau 73,78%

- **Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Provinsi Sumatera Barat**

Tabel 3.24
Perbandingan Capaian Total Skor Pemenuhan Hak Anak Tahun 2023
dengan Capaian Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Provinsi Tahun 2023
1	Total Skor Pemenuhan Hak Anak	(605)	900-1.000

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Provinsi Sumatera Barat untuk pertama kalinya meraih peringkat Propinsi Layak Anak (Provila) dengan total skor Pemenuhan Hak Anak 900-1.000 tentu saja ini didukung oleh capaian dari Kabupaten/ kota di Sumatera Barat. penghargaan KLA kategori Utama diraih oleh Kota Padang, Kota Sawahlunto dan Kota Padang Panjang. Sedangkan predikat kategori Nindya diraih Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kabupaten Agam serta 12 kabupaten/kota lainnya memperoleh peringkat Madya dan Pratama yang salah satunya Kabupaten Pasaman Barat dengan kategori madya.

- **Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Capaian ini dapat diraih berkat kerjasama dan kerja keras semua instansi terkait, dan tentu saja harus didukung dengan anggaran yang memadai di DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat maupun di seluruh lintas sektor dan lintas vertikal yang ada di Kabupaten Pasaman Barat yang tujuannya untuk mengupayakan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan generasi emas di Kabupaten Pasaman Barat.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).
2. Belum optimalnya capaian skor Pemenuhan Hak Anak
3. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak
4. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini

Solusi yang akan dilakukan untuk Pencapaian Kinerja:

1. Mengoptimalkan Pemenuhan Hak Anak dan Pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dengan meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait.

2. Meningkatkan capaian skor Pemenuhan Hak Anak dengan memenuhi dengan maksimal kriteria-kriteria penilaian
3. Mengoptimalkan Sekolah Ramah Anak
4. Mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini

- **Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Adapun Program/Kegiatan penunjang pencapaian kinerja ini adalah Program Pemenuhan Hak Anak dengan Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang terdiri dari dua sub kegiatan yaitu:

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 23.525.000 terealisasi sebesar Rp22.838.700 atau (97,08%)
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 72.584.35 dengan realisasi Rp 70.142.021 atau sebesar 96,64%

Sasaran 2 Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Adapun indikator sasaran Terpenuhinya Hak Anak adalah Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Rasio Kekerasan Terhadap Anak

- **Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan**
- **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 3.25
Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan
Tahun 2023

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Rasio Kekerasan Terhadap	3,5	6,3	55,55	Rendah

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Rasio Kekerasan terhadap perempuan merupakan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan per 100.000 penduduk perempuan. Rasio Kekerasan terhadap perempuan yang ditargetkan dengan rasio 3,5 baru tercapai 6,3 rasio.

- **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022**

Tabel 3.26
Perbandingan Capaian Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan
Tahun 2022-2023

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	3,5	6,3	4,7	10,7

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Rasio kekerasan terhadap perempuan menunjukkan penurunan dari 10,7 per 100.000 jumlah penduduk perempuan menjadi 6,3 per 100.000 penduduk perempuan . Jumlah kasus kekerasan menurun pada tahun 2023 menjadi 14 kasus dari 24 Kasus pada tahun 2022.

Angka ini jauh dari target tahun 2023 sesuai RPJMD Tahun 2021-2026, yakni 0 per 100.000 Jumlah penduduk perempuan. Berikut adalah perkembangan rasio kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Pasaman Barat selama periode 2021-2023.

- **Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2026**

Tabel 3.27
Perbandingan Capaian Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023
dengan Target Renstra Tahun 2026

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja sd Tahun 2023	% Pencapaian Kinerja
1	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0	6,3	73,78

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Rasio Kekerasan terhadap perempuan tahun 2023 jauh dari target tahun 2026 sesuai RPJMD Tahun 2021-2026, yakni 0 per 100.000 Jumlah penduduk perempuan

- **Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Capaian ini dapat diraih berkat kerjasama dan kerja keras semua instansi terkait, dan tentu saja harus didukung dengan anggaran yang memadai di DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat maupun di seluruh lintas sektor dan lintas vertikal yang ada di Kabupaten Pasaman Barat yang tujuannya untuk mengupayakan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan generasi emas di Kabupaten Pasaman Barat.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya Manusia dalam penanganan kasus, terutama tenaga psikolog klinis belum ada di Kabupaten Pasaman Barat
2. Kurangnya KIE kepada masyarakat tentang pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan karena keterbatasan anggaran.

Solusi yang akan dilakukan untuk Pencapaian Kinerja:

1. Pengadaan CPNS Formasi Psikolog Klinis
2. Jika Anggaran tersedia meningkatkan KIE Pencegahan kekerasan terhadap perempuan ke Masyarakat

- **Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Adapun Program/Kegiatan penunjang pencapaian kinerja ini adalah Program Perlindungan Perempuan dengan anggaran Rp 136.940.000 dengan realisasi sebesar Rp 59.567.500 (43,49%), namun anggaran program ini untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan hanya sebesar Rp 19.250.000,-

- **Rasio Kekerasan Terhadap Anak**

- **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 3.28
Rasio Kekerasan Terhadap Anak
Tahun 2023

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0,01	3,09	0,32	Snagat Rendah

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Rasio Kekerasan terhadap anak merupakan jumlah korban kekerasan terhadap anak per 10.000 anak sampai umur 18 tahun.. Rasio Kekerasan terhadap anak yang ditargetkan dengan rasio 0,01 baru tercapai 3,09 rasio.

- **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022**

Tabel 3.29
Perbandingan Capaian Rasio Kekerasan Terhadap Anak
Tahun 2022-2023

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0,01	3,09	0,01	3

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Perkembangan rasio kekerasan terhadap anak (dihitung per 10.000 anak usia kurang dari 18 tahun). Kekerasan terhadap anak mengalami kenaikan pada tahun 2023, baik dari segi jumlah kasus maupun rasio, dimana 35 kasus di Tahun 2022 naik menjadi 45 Kasus pada tahun 2023.

Rasio Kekerasan terhadap anak meningkat dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan baik ke lembaga P2TP2A maupun ke kepolisian. faktor ekonomi keluarga, pengaruh tontonan anak-anak dilingkungan tempat tinggal dan sekolah juga sangat berpengaruh pada tingginya kasus kekerasan pada anak.

- **Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2026**

Tabel 3.30
Perbandingan Capaian Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023
dengan Target Renstra Tahun 2026

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja sd Tahun 2023	% Pencapaian Kinerja
1	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0	3,09	0

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Rasio Kekerasan terhadap perempuan tahun 2023 jauh dari target tahun 2026 sesuai RPJMD Tahun 2021-2026, yakni 0 per 10.000 Jumlah anak usia dibawah 18 Tahun.

- **Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya Manusia dalam penanganan kasus, terutama tenaga psikolog klinis belum ada di Kabupaten Pasaman Barat
2. Kurangnya KIE kepada masyarakat tentang pencegahan kasus kekerasan terhadap anak karena keterbatasan anggaran.

Solusi yang akan dilakukan untuk Pencapaian Kinerja:

1. Pengadaan CPNS Formasi Psikolog Klinis
2. Jika Anggaran tersedia meningkatkan KIE Pencegahan kekerasan terhadap anak ke Masyarakat

- **Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Adapun Program/Kegiatan penunjang pencapaian kinerja ini adalah Program Perlindungan Khusus Anak dengan anggaran Rp 349283.900 dengan realisasi sebesar Rp 300.513.412 (76,22%), namun anggaran program ini untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan hanya sebesar Rp 14.103.640,-

Sasaran 2 Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif
- Keterwakilan perempuan di lembaga legislative

- **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 3.31
Target dan Capaian Kinerja Keterwakilan Perempuan
di lembaga eksekutif dan legislatif
Tahun 2023

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	Keterwakilan Perempuan dilembaga eksekutif	65,2%	5,2%	7,97	Sangat Rendah

2	Keterwakilan Perempuan dilembaga legislatif	7,5%	7,5%	100	Sangat Tinggi
---	---	------	------	-----	---------------

Sumber: Buku Profil Gender dan Anak Tahun 2023

Keterwakilan di lembaga legislatif, dan keterwakilan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif merupakan factor pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

- **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022**

Tabel 3.32
Perbandingan Capaian Kinerja Keterwakilan Perempuan di lembaga eksekutif dan legislatif Tahun 2022-2023

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Keterwakilan Perempuan dilembaga eksekutif	65,2%	5,2%	6,5%	4,73%
2	Keterwakilan Perempuan dilembaga legislatif	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%

Sumber: Buku Profil Gender dan Anak Tahun 2022-2023

Keterwakilan Perempuan dilembaga eksekutif meningkat dari tahun 2022 dengan capaian 4,73 meningkat ditahun 2023 dengan capaian 5,2 dan untuk keterwakilan perempuan dilembaga legislative masih dalam angka yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu 7,5% karena Pemilihan Calon Anggota Legislatif Kabupaten Pasaman Barat baru akan dilaksanakan pada Tahun 2024.hal ini menandakan meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan.

- **Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2026**

Tabel 3.33
Perbandingan Capaian Kinerja Keterwakilan Perempuan di lembaga eksekutif dan legislatif Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2026

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja sd Tahun 2023	% Pencapaian Kinerja
1	Keterwakilan Perempuan dilembaga eksekutif	66%	5,2%	7,87

2	Keterwakilan Perempuan dilembaga legislatif	30%	7,5%	25
---	---	-----	------	----

Sumber: Buku Profil Gender dan Anak Tahun 2022-2023

Capaian Keterwakilan Perempuan dilembaga eksekutif dan lembaga legislative masih jauh dari target Renstra 2026.

- **Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama partisipasi dalam angkatan kerja, perempuan dilembaga eksekutif dan legislatif.

Alternatif solusi yang dilakukan:

- Untuk pencapaian target kinerja, DPPKBP3A telah berupaya meningkatkan Sumber Daya Manusia kepada Kelompok Perempuan Partai Politik (KPPI) berupa peningkatan kapasitas anggota sebagai anggota partai politik. Namun untuk terpilihnya perempuan di legislative tergantung dari kepercayaan masyarakat kepada calon legislative perempuan tersebut.
- **Besaran ARG pada belanja langsung APBD**
- **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 3.34
Target dan Capaian Kinerja Besaran ARG pada Belanja Langsung APBD Tahun 2023

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	Persentase besaran anggaran responsive gender terhadap total anggaran Belanja Langsung APBD	4,67	0,8	17,13	Sangat Rendah

Sumber: Data Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

- **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022**

Tabel 3.35
Perbandingan Capaian Kinerja Besaran ARG pada Belanja Langsung APBD
Tahun 2022-2023

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Persentase besaran anggaran responsive gender terhadap total anggaran Belanja Langsung APBD	4,67	0,8	4,65	0,19

Sumber: Data Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Pada tahun 2022, Anggaran Yang Responsif Gender (ARG) dibanding total belanja langsung pada APBD adalah 0.19%. Sebenarnya, perhitungan ARG Tahun 2021 dan Tahun 2022 tidak bisa diperbandingkan karena menggunakan metode yang berbeda. Pada Tahun 2022, dengan penggunaan SIPD, tidak ada lagi perbedaan antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Namun, yang ada adalah Belanja Operasi dan Belanja Modal. Untuk tahun 2023 besaran ARG pada belanja Operasi dan Belanja Modal APBD mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu 0,8%.

- **Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2026**

Tabel 3.36
Perbandingan Capaian Kinerja Besaran ARG pada Belanja Langsung APBD
Tahun 2023
dengan Target Renstra Tahun 2026

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja sd Tahun 2023	% Pencapaian Kinerja
1	Persentase besaran anggaran responsive gender terhadap total anggaran Belanja Langsung APBD	12	0,8	6,6

Sumber Data Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

- **Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

Meski demikian, ada beberapa permasalahan yang terkait dengan ARG di Kabupaten Pasaman Barat. Pertama, terjadinya pengurangan alokasi anggaran yang responsif gender pada masing-masing OPD. Hal ini terjadi karena secara keseluruhan total anggaran program pada OPD memang mengalami penurunan. Kedua, jumlah OPD yang melengkapi *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) juga mengalami penurunan. Total ARG dihitung berdasarkan program/kegiatan yang dalam proses perencanaannya dilengkapi dengan GAP dan GBS.

Alternatif solusi yang dilakukan:

Kondisi ini dapat diperbaiki dengan melakukan penguatan terhadap kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), yakni kelompok kerja PUG dan tim koordinasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG). Penguatan terhadap tim ini memang mengalami kendala selama masa pandemi Covid-19, karena terjadinya refocusing anggaran di OPD pelaksanaan PUG maupun OPD penggerak (*driver*) PPRG.

Tujuan 2 Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk

Adapun indikator kinerja untuk pengukuran keberhasilan dari Tujuan 1 Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk yaitu Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan Total Fertility Rate (TFR)

5. . Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

- **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 3.37
Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Tahun 2023

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	LPP	1,23	1,22	100,81	Sangat Tinggi

Sumber: Data Dinas Dukcapil Kab.Pasaman Barat Tahun 2023

- Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tabel 3.38
Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Tahun 2022-2023

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	LPP	1,23	1,22	1,24	1,41

Sumber: Data Dinas Dukcapil Kab.Pasaman Barat Tahun 2023

Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi. Angka LPP Kabupaten Pasaman Barat menurun dari 1,41 pada tahun 2022 menjadi 1,22 pada tahun 2023.

- Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2026

Tabel 3.39
Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tahun 2023
dengan Target Renstra Tahun 2026

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja sd Tahun 2023	% Pencapaian Kinerja
1	LPP	1,2	1,22	98,36

Sumber: Data Dinas Dukcapil Kab.Pasaman Barat Tahun 2023

- Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Provinsi Sumatera Barat

Tabel 3.40
Perbandingan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tahun 2023
dengan Capaian Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	LPP Sumatera Barat	1,08
2	LPP Pasaman Barat	1,22

Sumber: Data Dinas Dukcapil Kab.Pasaman Barat Tahun 2023

Angka LPP Kabupaten Pasaman Barat masih berada dibawah angka LPP Provinsi Sumatera Barat

Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 salah satunya adalah tingginya angka migrasi keluar penduduk pada tahun 2023.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 salah satunya adalah tingginya angka migrasi keluar penduduk pada tahun 2023.
2. Angka Pemakaian Kontrasepsi masih rendah
3. Tingginya angka kelahiran

Solusi yang akan dilakukan untuk Pencapaian Kinerja:

1. KIE kepada masyarakat tentang Keluarga Berencana
2. Meningkatkan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi gratis kewilayah-wilayah yang tidak terjangkau fasilitas kesehatan
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga Penyuluh KB (PKB)

• **Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Adapun Program/Kegiatan penunjang pencapaian kinerja ini adalah Program Pengendalian Penduduk dan Program Pembinaan Keluarga Berencana. Program ini selain didukung dengan dana DAU juga didukung dengan Dana DAK Non Fisik (BOKB) dan DAK Fisik Bidang Keluarga Berencana.

6. Total Fertility Rate (TFR)

- Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.41
Capaian Kinerja Total Fertility Rate (TFR)
Tahun 2023

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	TFR	3,05	2,51	121,5	Sangat Tinggi

Sumber: Website Badan Pusat Statistik

Angka Total Fertility Rate (TFR) menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Fertilitas Kabupaten Pasaman Barat menurun dari angka 3,05 menjadi 2,51 pada tahun 2023, hal ini berarti hanya sekitar 2 anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya.

- Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tabel 3.42
Perbandingan Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2022-2023

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	TFR	3,05	2,51	3,05	2,51

Sumber: Website Badan Pusat Statistik

- Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2026

Tabel 3.43
Perbandingan Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2023
dengan Target Renstra Tahun 2026

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja sd Tahun 2023	% Pencapaian Kinerja
1	TFR	3,05	2,51	121,5

Sumber: Website Badan Pusat Statistik

- **Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Provinsi Sumatera Barat**

Tabel 3.44
Perbandingan Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2023
dengan Capaian Nasional

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	TFR Nasional	2,18
2	TFR Pasaman Barat	2,51

Sumber: Website Badan Pusat Statistik

Angka TFR Kabupaten Pasaman Barat masih berada dibawah angka TFR Nasional.

Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 salah satunya adalah tingginya angka migrasi keluar penduduk pada tahun 2023, karena kalau dilihat dari angka kelahiran mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022 angka kelahiran sebesar 7.680 dan 7.880 pada tahun 2023.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Angka Pemakaian Kontrasepsi masih rendah
2. Tingginya angka kelahiran
3. Tingginya angka Unmetneed

Solusi yang akan dilakukan untuk Pencapaian Kinerja:

1. Menata kembali PLKB dan meningkatkan peran IMP dan Kader;
2. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengendalian penduduk, mencakup pengendalian kelahiran dan migrasi penduduk;
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, penyediaan Alat kontrasepsi, meningkatkan promosi dan KIE KB;
4. Peningkatan kerjasama dengan klinik KB baik pemerintah maupun swasta;

- **Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Adapun Program/Kegiatan penunjang pencapaian kinerja ini adalah Program Pengendalian Penduduk dan Program Pembinaan Keluarga Berencana. Program ini selain didukung dengan dana DAU juga didukung dengan Dana DAK Non Fisik (BOKB) dan DAK Fisik Bidang Keluarga Berencana.

Sasaran 4 Menurunnya Angka Kelahiran pada Wanita Usia Subur 15-19 Tahun dengan indikator ASFR 15-19 Tahun

- **ASFR 15-19 Tahun**

- **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Angka kelahiran menurut kelompok umur tertentu Age Spesific Fertility Rate (ASFR 15-19) menggambarkan banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur 15-19 tahun per 1.000 perempuan kelompok umur 15-19 tahun

Tabel 3.45
Capaian Kinerja ASFR 15-19 Tahun
Tahun 2023

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	ASFR 15-19 Tahun	33	12	275	Sangat Tinggi

Sumber: Website Badan Pusat Statistik

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tabel 3.46
Perbandingan ASFR 15-19 Tahun
Tahun 2022-2023

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	ASFR 15-19 Tahun	33	12	34	12

Sumber: Website Badan Pusat Statistik

- Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2026

Tabel 3.47

**Perbandingan Perbandingan ASFR 15-19 Tahun
Tahun 2023
dengan Target Renstra Tahun 2026**

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja sd Tahun 2023	% Pencapaian Kinerja
1	ASFR 15-19 Tahun	30	12	250

Sumber: Website Badan Pusat Statistik

- Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Nasion

Tabel 3.48

**Capaian Age Spesific Fertility Rate (ASFR 15-19)
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2023**

No	Indikator Capaian	2021	2022	2023
1	ASFR (15-19) Indonesia	26,64	26,64	26,64
2	ASFR (15-19) Kab. Pasaman Barat	38,20	38,2	12

Sumber : Website Badan Pusat Statistik

Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Semakin tingginya perhatian orangtua terhadap pendidikan anak-anak menyebabkan menurunnya angka kelahiran pada wanita Usia Subur 15-19 Tahun, namun secara nasional angka ASFR 15-19 tahun ini meningkat yang disebabkan pengaruh akses informasi di media sosial yang semakin pesat di zaman serba modern ini. Media yang kerap kali dijadikan sebagai wadah edukatif, informatif, serta inspiratif, juga dijadikan sebagai tempat untuk mencari hiburan yang kemungkinan mengarah pada unsur negatif.

Hal itu kemudian menjatuhkan remaja pada masalah kesehatan reproduksi seperti perkawinan anak, Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD), Infeksi Menular Seksual (IMS), HIV/AIDS, permasalahan kesehatan mental, penyimpangan orientasi seksual, dan terjadinya tindak kekerasan seksual.

Guna melindungi remaja dari masalah-masalah tersebut, BKKBN terus menggaungkan informasi soal kesehatan reproduksi yang benar dan mudah untuk diakses remaja melalui media sosial

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Advokasi dan KIE kepada remaja tentang kesehatan reproduksi remaja, bahaya pernikahan diusia anak.
2. Kurangnya SDM untuk melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat

Solusi yang akan dilakukan untuk Pencapaian Kinerja:

1. Meningkatkan Advokasi dan KIE tentang Keluarga Berencana
 2. Meningkatkan SDM Petugas Pencatatan dan Pelaporan di Kecamatan
 3. Menambah Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di lapangan
- **Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Adapun Program/Kegiatan penunjang pencapaian kinerja ini adalah Program Pengendalian

- **Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern (MCPR)**
- **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 3.49
Capaian Kinerja MCPR
Tahun 2023

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	MCPR	66,5	54,01	81,21	Tinggi

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tabel 3.50
Perbandingan MCPR
Tahun 2022-2023

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	MCPR	66,5	54,01	66,25	63,44

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

- **Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2026**

Tabel 3.51
Perbandingan MCPR Tahun 2023
dengan Target Renstra Tahun 2026

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja sd Tahun 2023	% Pencapaian Kinerja
1	MCPR	68	54,01	79,42

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Angka pemakaian Kontrasepsi modern mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan perbedaan metode penginputan data, dimana pada tahun 2022 input data dilakukan secara manual, sedangkan pada tahun 2023 menggunakan aplikasi New Siga, hal ini menyebabkan banyak data akseptor yang menggunakan kontrasepsi modern tidak terinput secara keseluruhan.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Menata kembali PLKB dan meningkatkan peran IMP dan Kader;
2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, penyediaan Alat kontrasepsi, meningkatkan promosi dan KIE KB;
3. Peningkatkan kerjasama dengan klinik KB baik pemerintah maupun swasta;
4. Mengoptimalkan koordinasi dengan PD dalam pembuatan dokumen PPRG
5. Menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait, seperti organisasi perangkat daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga/Organisasi Masyarakat.
6. Melakukan inovasi dan memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan kualitas layanan.

Solusi yang akan dilakukan untuk Pencapaian Kinerja:

1. Meningkatkan Advokasi dan KIE tentang Keluarga Berencana
2. Meningkatkan SDM Petugas Pencatatan dan Pelaporan di Kecamatan
3. Menambah Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di lapangan

- **Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Adapun Program/Kegiatan penunjang pencapaian kinerja ini adalah Program Pengendalian Penduduk dan Program Pembinaan Keluarga Berencana. Program ini selain didukung dengan dana DAU juga didukung dengan Dana DAK Non Fisik (BOKB) dan DAK Fisik Bidang Keluarga Berencana.

Sasaran 5 Meningkatnya kualitas keluarga

- **Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)**
- **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 3.52
Capaian Kinerja Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)
Tahun 2023

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	65	10,66	16,4	Sangat Rendah

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tabel 3.53
Perbandingan Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)
Tahun 2022-2023

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	65	10,66	63	21,7

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

- **Perbandingan antara capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2026**

Tabel 3.54
Perbandingan Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2026

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja sd Tahun 2023	% Pencapaian Kinerja
1	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	75	10,66	14,21

Sumber: Olahan Fungsional Perencana DPPKBP3A

Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Untuk sasaran Meningkatnya kualitas keluarga dengan indikator kinerja Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita yang ditargetkan 65% pada tahun 2023 baru tercapai 10,67% dimana jumlah balita 30.865 orang sedangkan yang menjadi Anggota BKB sebanyak 3.293 orang, hal ini disebabkan tidak tersedianya anggaran untuk honor kader BKB sehingga pelaksanaan kegiatan BKB tidak terlaksana secara maksimal dan kita juga tidak bisa untuk membentuk kelompok BKB baru. Kelompok BKB pada Tahun 2022 berjumlah 102, pada tahun 2023 menjadi 100 Kelompok, sementara dibandingkan dengan jumlah Posyandu yang berjumlah 470 buah Posyandu menjadi salah satu rendahnya capaian BKB.

Penggantian Transportasi Kader BKB yang sebelumnya di bayar kan dengan Dana Nagari, pada Tahun 2023 banyak Nagari yang tidak membayarkan uang penggantian Transportasi kader BKB dengan alasan tidak ada di Permendes dicantumkan penganggaran untuk Kader BKB, Keputusan dari DPMN ke Nagari Nagari tentang tidak ada penganggaran penggantian Transportasi ini berimbas terhadap jalannya kegiatan Kelompok BKB jauh menurun.

Kegiatan Kelompok BKB yang seharusnya satu perkelompok terdiri dari 5 Kader, ada di beberapa Nagari mereka diharuskan membagi 5 kader ini kesemua Posyandu sehingga kegiatannya tidak optimal sebagaimana mestinya.

Masih rendahnya SDM Kader BKB karena pada tahun 2023 anggaran untuk pelatihan kader di alihkan ke kegiatan lain.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Tidak tersedianya Honor bagi kader BKB, sehingga kader tidak bekerja secara maksimal
2. Kurangnya Jumlah PKB sehingga pelaksanaan KIE tidak terjangkau ke semua daerah.

Solusi yang akan dilakukan untuk Pencapaian Kinerja:

1. Membentuk kelompok-kelompok BKB baru dan mengaktifkan kembali kelompok-kelompok yang sudah ada
2. Menyediakan dana untuk honor kader
3. Menambah Tenaga Penyuluh KB minimal 1 (satu) orang Per Nagari
4. Memberikan Advokasi dan KIE Kepada Masyarakat tentang pentingnya pola pengasuhan anak untuk perkembangan anak balita dan ikut dalam kelompok BKB

- **Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Adapun Program/Kegiatan penunjang pencapaian kinerja ini adalah Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)k. Program ini selain didukung dengan dana DAU juga didukung dengan Dana DAK Non Fisik (BOKB).

Sasaran 7 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A

Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membenahkan kinerja. Pembenahan kinerja ini diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai subsistem Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melainkan menyesuaikan juga dengan tujuan dan sasaran strategis lingkup Kabupaten Pasaman Barat. Dalam mencapai sasaran strategis meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada indikator yang harus tercapai yaitu :

Tabel 3.55
Capaian Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A
Tahun 2023

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	Nilai SAKIP DPPKBP3A	B	B	100	Sangat Tinggi
2	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100	Sangat Tinggi
3	Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan DPPKBP3A	75%	100%	133	Sangat Tinggi
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	NA	NA	NA

Nilai SAKIP didapat berdasarkan LHE SAKIP OPD oleh Inspektorat, Tahun 2023 dengan nomor: 700.1.2.1/26/Inspekt-LHE/IX 2023 tanggal 18 September 2023. Evaluasi dilaksanakan terhadap Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100.

Tabel 3.52
Capaian Nilai SAKIP DPPKBP3A Tahun 2023

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	24,00
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	20,70
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	9,90
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	11,00
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		65,60
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		B

Nilai SAKIP pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah 65,60 dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori B) yang berarti Baik, akuntabilitasnya kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan Level Maturitas SPIP

pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pada Kabupaten Pasaman Barat Nomor : PE.09.03/LHP-593/PW03/3/2022 Tanggal 29 Desember 2022 adalah 3,132 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) atau Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK terhadap Laporan Keuangan, capaian tahun 2023 sudah mencapai 100%, nilai ini diambil dari hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022, dimana tidak adanya temuan BPK yang ditindak lanjuti pada tahun 2023.

Meningkatnya Pelayanan yang Berkualitas dengan Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Tahun 2023 pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum dilaksanakan sehingga belum ada penilainnya.

3.2 Realisasi Anggaran

Tujuan dan sasaran DPPKBP3A dituangkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan disesuaikan pada indikator yang dihasilkan (output). Program, kegiatan, dan sub kegiatan mendapatkan alokasi anggaran yang nantinya direalisasikan sebagai implementasi kinerja keuangan dan capaian fisik kinerja DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat. Target dan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.53

Realisasi Anggaran DPPKBP3A Tahun 2023

No	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		4.957.555.254	3.984.253.886	80,37
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.373.114.886	3.419.607.324	78,20
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.040.494.886	3.086.987.324	76,40
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	242.200.000	242.200.000	100,00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	90.420.000	90.420.000	100,00

		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.935.000	13.915.000	99,86
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.935.000	13.915.000	99,86
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.463.840	23.463.840	100,00
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	23.463.840	23.463.840	100,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	302.736.528	295.746.692	97,69
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.900.000	6.900.000	100,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.759.000	19.888.600	83,71
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.697.200	11.767.000	92,67
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	14.999.500	100,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	244.380.328	242.191.592	99,10
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.000.000	64.355.180	99,01
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000	64.355.180	99,01
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	179.305.000	167.165.850	93,23
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	141.535.000	129.733.650	91,66
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.770.000	27.460.000	98,88
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	9.972.200	99,72
2	Program Pengendalian Penduduk		288.027.000	184.578.194	64,08
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	84.805.000	80.499.650	94,92
		Advokasi, Sosialisasi, dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang	84.805.000	80.499.650	94,92

		SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal			
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	203.222.000	104.078.544	51,21
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000	45.225.000	70,44
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	35.222.000	21.113.544	59,94
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	37.800.000	37.740.000	99,84
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	66.000.000	0	0,00
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		2.539.655.750	2.163.931.150	85,21
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	982.650.000	933.812.250	95,03
		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	80.000.000	76.135.000	95,17
		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000	147.049.000	98,03
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	143.000.000	137.570.000	96,20
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	529.650.000	497.623.250	93,95
		Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	75.435.000	94,29
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	58.000.000	57.870.000	99,78
		Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	20.000.000	19.890.000	99,45
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	38.000.000	37.980.000	99,95
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta	1.084.342.000	795.152.750	73,33

		Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten /Kota			
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18.900.000	18.646.850	98,66
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	825.185.000	604.523.700	73,26
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	226.757.000	159.803.200	70,47
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.500.000	12.179.000	90,21
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	414.663.750	377.096.150	90,94
		Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	173.163.750	159.881.150	92,33
		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000	6.485.000	72,06
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	232.500.000	210.730.000	90,64
4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		1.996.600.000	1.776.743.800	88,99
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, tdd:	1.996.600.000	1.776.743.800	88,99
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan	61.600.000	36.393.800	59,08

		Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)			
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000	234.980.000	65,27
		Penyediaan Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.575.000.000	1.505.370.000	95,58
5	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		651.390.750	544.207.390	83,55
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, tdd:	68.280.750	37.288.000	54,61
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	68.280.750	37.288.000	54,61
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, tdd:	583.110.000	506.919.390	86,93
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	583.110.000	506.919.390	86,93
6	Program Perlindungan Perempuan		42.750.000	18.157.000	42,47
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	19.250.000	18.157.000	94,32
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan , Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	19.250.000	18.157.000	94,32
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban	23.500.000	16.037.500	68,24

		Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, tdd:			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaa n Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten /Kota	23.500.000	16.037.500	68,24
8	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		37.765.200	37.400.500	99,03
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota , tdd:	37.765.200	37.400.500	99,03
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	37.765.200	37.400.500	99,03
9	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		96.109.350	92.980.721	96,74
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	96.109.350	92.980.721	96,74
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	23.525.000	22.838.700	97,08
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	72.584.350	70.142.021	96,64
10	Program Perlindungan Khusus Anak		156.600.640	133.405.273	85,19
		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	14.103.640	13.943.700	98,87
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	14.103.640	13.943.700	98,87
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	142.497.000	119.461.573	83,83

	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	142.497.000	119.461.573	83,83
JUMLAH ANGGARAN		10.766.453.944	8.935.657.914	83,00

3.3 Penghargaan

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tempat / Tanggal Penyerahan Penghargaan	Penerima	Deskripsi
1	Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Madya	Kementrian PPPA Republik Indonesia	Jakarta, 12 Oktober 2021	Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat	Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah Kab/Kota dengan Sistem Pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan
2	Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Madya	Kementrian PPPA Republik Indonesia	Jakarta, 23 Agustus 2022	Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat	Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah Kab/Kota dengan Sistem Pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan
3	Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Madya	Kementrian PPPA Republik Indonesia	Semarang, 23 Juli 2023	Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat	Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah Kab/Kota dengan Sistem Pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan
4	Penghargaan Manggala Karya Kencana	BKKBN RI	Puri Agung Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan, 94 Juli 2023	Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Hamsuardi dan Ketua TP-PKK	Manggala Karya Kencana merupakan penghargaan pemerintah pusat tertinggi melalui BKKBN kepada Kepala Daerah dan Ketua TP-PKK, yang dinilai mempunyai dedikasi tinggi terhadap program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan Keluarga.
5	Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Madya tahun 2020	Kementrian PPPA	Jakarta, 6 September 2021	Bupati Pasaman Barat Hamsuardi,S.Ag	Anugerah Parahita Ekapraya merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah Pusat kepada Kabupaten yang dinilai memenuhi Pengarusutamaan Gender dan memiliki Perencanaan Kabupaten mulai dari Kelembagaan, Penganggaran, Pelaksanaan , Evaluasi dan Pengawasan. Anugerah Parahita Ekapraya merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah Pusat kepada Kabupaten yang dinilai memenuhi Pengarusutamaan Gender dan memiliki Perencanaan Kabupaten mulai dari Kelembagaan, Penganggaran, Pelaksanaan , Evaluasi dan Pengawasan.
6	Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Pratama tahun 2022	Kementrian PPPA	Jakarta, 22 Desember 2023	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	Anugerah Parahita Ekapraya merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah Pusat kepada Kabupaten yang dinilai memenuhi Pengarusutamaan Gender dan memiliki Perencanaan Kabupaten mulai dari Kelembagaan, Penganggaran, Pelaksanaan , Evaluasi dan Pengawasan.

Piagam Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pasaman Barat dengan kategori Madya Tahun 2021



Piagam Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pasaman Barat dengan kategori Madya Tahun 2022



Piagam Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pasaman Barat dengan kategori Madya Tahun 2023



Piagam Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Madya Tahun 2021



Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Pratama Tahun 2022



BAB IV

PENUTUP


A. KESIMPULAN

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Tahun 2021-2026, pada Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 22 (Dua Puluh Dua) kegiatan dalam 10 (Sepuluh) program sesuai dengan skala prioritas melalui APBDP Tahun Anggaran 2023 untuk mendukung pencapaian 7 (Tujuh) sasaran dalam 13 (Tiga belas) indikator sasaran (output) dan 5 (Lima) tujuan yang telah ditetapkan dalam rancangan strategis. Hasil capaian atas 12 (dua belas) indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian adalah sebagai berikut :
 - Terlaksananya dengan “ sangat baik” sebanyak 7 (empat) indikator sasaran
 - Terlaksananya dengan “ baik” sebanyak 1 (satu) indikator sasaran
 - Terlaksananya dengan “ cukup” sebanyak 2 (dua) indikator sasaran
 - Terlaksananya dengan “buruk” sebanyak 2 (dua) indikator Sasaran
 - Untuk target indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A dengan indikator kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum dilaksanakan penilainya.
3. Tidak tercapainya pencapaian anggaran (100%) disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok – pokok permasalahan yang saling berkaitan, yaitu :
 - Keterlambatan dalam proses administrasi keuangan;
 - Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga/sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - Adanya keterlambatan dalam penyampaian Juknis ke instansi sehingga terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan percepatan dalam melaksanakan administrasi keuangan;

- 
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM;
 3. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana SKPD;
 4. Dalam penyusunan anggaran akan mengacu sepenuhnya pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada Sasaran, Misi, Visi; dan
 5. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan setiap kegiatan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. ANNA RAHMADIA

Jabatan : KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : HAMSUARDI

Jabatan : BUPATI PASAMAN BARAT


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Januari 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI PASAMAN BARAT



HAMSUARDI

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



dr. ANNA RAHMADIA
Pembina Tk. I /IV.b
NIP 19820927 200805 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terpenuhinya Hak Anak	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	600
II	Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	2,3
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0,01
III	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif	65,2
		Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif	7,5
		Persentase besaran anggaran responsive gender terhadap total anggaran Belanja Langsung APBD	4,67
IV	Menurunnya Angka kelahiran pada WUS 15-19 Tahun	ASFR 15-19 Tahun	33
V	Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern	mCPR	66,5
VI	Meningkatnya Jumlah Keluarga yang ikut BKB	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	65
VII	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A	Nilai SAKIP DPPKBP3A	B
		Level Maturitas SPIP	Level 3
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan DPPKBP3A	75%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 656,389,750	APBD
2	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 42,750,000	APBD
3	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 39,040,200	APBD
4	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 97,405,000	APBD
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 169,075,640	APBD
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5,172,718,417	APBD
7	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 288,027,000	APBD+DAK
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rp. 2,567,205,750	APBD+DAK

9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 2,004,600,000	APBD+DAK
	JUMLAH	Rp. 11,037,211,757	

BUPATI PASAMAN BARAT

HAMSUARDI

Simpang Empat, Januari 2023
 KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
 KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

HILANA RAHMADIA
 Pembina Tk. I /IV.b
 NIP. 19820927 200805 2 001

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,640,620,217
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13,935,000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	50,000,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	217,493,200
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65,000,000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185,670,000
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	73,279,750
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, sosial, dan ekonomi pada Organisasi kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten Kota	583,110,000
3	Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	19,250,000
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	23,500,000
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39,040,200
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	97,405,000

7	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup daerah Kabupaten/Kota	25,303,640
		Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota	143,772,000
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	-
8	Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	84,805,000
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	203,222,000
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	982,650,000
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	58,000,000
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1,084,342,000
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	442,213,750
10	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2,004,600,000
	JUMLAH ANGGARAN		11,037,211,757

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN, PEREMPUAN DAN
BERLINDUNGAN ANAK



dr. H. ANNA RAHMADIA
Pembina Tk. I /IV.b
NIP.19820927 200805 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. ANNA RAHMADIA

Jabatan : KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : HAMSUARDI

Jabatan : BUPATI PASAMAN BARAT

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, Januari 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI PASAMAN BARAT

HAMSUARDI

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

dr. ANNA RAHMADIA, M.KM
Pembina Tk. I /IV.b
NIP 19820927 200805 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

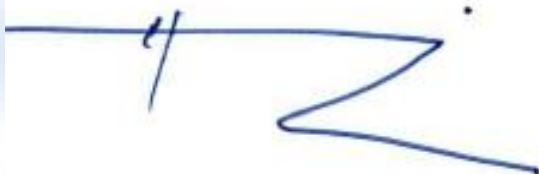
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terpenuhinya Hak Anak	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	750
II	Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	2,3
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0,01
III	Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif	65,40%
		Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif	30%
		Persentase besaran anggaran responsive gender terhadap total anggaran Belanja Langsung APBD	8%
IV	Menurunnya Angka kelahiran pada WUS 15-19 Tahun	ASFR 15-19 Tahun	32
V	Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern	mCPR	66,75%
VI	Meningkatnya kualitas keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	70%
VII	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A	Nilai SAKIP DPPKBP3A	BB
		Level Maturitas SPIP	Level 3
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan DPPKBP3A	75%

NO	PROGRAM		ANGGARAN	KET
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.	612.079.400	APBD
2	Program Perlindungan Perempuan	Rp.	12.365.000	APBD
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		155.000.000	APBD
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.	21.510.000	APBD
5	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp.	44.287.000	APBD
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp.	75.442.840	APBD
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	4.833.815.090	APBD
8	Program Pengendalian Penduduk	Rp.	236.348.000	APBD+DAK

9	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rp.	3.261.963.500	APBD+DAK
10	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp.	1.892.164.000	APBD+DAK
	JUMLAH	Rp.	11.144.974.830	

BUPATI PASAMAN BARAT



HAMSUARDI

Simpang Empat, Januari 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



dr. HJ. ANNA RAHMADIA, M.KM

Pembina Tk. I /IV.b

NIP. 19820927 200805 2 001

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.387.292.090
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.572.500
		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	15.943.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	214.100.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.000.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.907.500
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	12.079.400
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, sosial, dan ekonomi pada Organisasi kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten Kota	600.000.000
3	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	12.365.000
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	155.000.000
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.510.000
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	44.287.000
7	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup daerah Kabupaten/Kota	15.000.000
		Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota	60.442.840

8	Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	18.548.000
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	217.800.000
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.150.600.000
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	273.000.000
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.605.376.000
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	232.987.500
10	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	317.164.000
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan	1.575.000.000
	JUMLAH ANGGARAN		11.144.974.830

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK



dr. Hj. ANNA RAHMADIA, M.KM

Pembina Tk. I /IV.b

NIP.19820927 200805 2 001



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

TAHUN 2023

NOMOR : 700.1.2.1/26/Inspekt- LHE/IX/2023

TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2023

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Nilai Akuntabilitas Kinerja			
		2022		2023	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,70	30,00	24,00
2	Pengukuran Kinerja	25,00	21,60	30,00	20,70
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,05	15,00	9,90
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,50	25,00	11,00
5	Pencapaian Sasaran			-	
Nilai Akuntabilitas Kinerja			72,85		65,60
			BB		B

No	Catatan
1	Tidak ada perubahan Renaksi
2	Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
3	LKJP belum memberikan informasi target kinerja dan anggaran dengan realisasi kinerja dan anggaran yang tertera pada PK seluruh pegawai
4	Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
5	Monev hanya dilakukan pada tingkat dinas
6	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan belum sesuai standar.
7	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah belum disusun sesuai dengan PermenPANRB Nomor 53 tahun 2014
8	Monev hanya dilakukan pada tingkat dinas
9	Belum ada aplikasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
10	Monev hanya dilakukan pada tingkat dinas
11	Belum ada aplikasi pengukuran capaian kinerja
12	LKJP belum memberikan informasi mengenai perbandingan realisasi capaian kinerja OPD/Pemda dengan data realisasi capaian nasional
13	Tidak ada Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan yang dibuat oleh unit kerja/bidang
14	Belum ada pegawai yang mengikuti pelatihan tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

No	Rekomendasi
1	Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja melalui pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi) dalam rangka dan pengukuran capaian kinerja.
2	Meningkatkan pemanfaatan pengukuran kinerja dengan menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional serta berpengaruh dalam penyesuaian (refocusing) di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat.
3	Meningkatkan kepedulian seluruh pegawai atas pengukuran kinerja melalui laporan pengukuran kinerja triwulan pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat.
4	Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja melalui penyusunan pelaporan kinerja berdasarkan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5	Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja melalui pemberian informasi terkait dengan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level provinsi/nasional serta pemberian informasi tentang efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
6	Meningkatkan kepedulian seluruh pegawai atas pelaporan kinerja melalui laporan kinerja triwulan pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat agar menimbulkan perubahan budaya kinerja.
7	Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja melalui pelaksanaan evaluasi akuntabilitas sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pedoman teknis serta memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.



**Rencana Aksi Pencapaian Target Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rencana Aksi	Rencana Aksi Kinerja Sasaran				Hambatan/Permasalahan	Tindak Lanjut	Program	Penanggung Jawab
						Semester I		Semester II					
						Target	Realisasi	Target	Realisasi				
I	Terpenuhinya Hak Anak	Total score pemenuhan hak anak (Kisler 1-5)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Nilai	720				Nilai	720			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Bidang Peningkatan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak
II	Menurunnya Angka Kematian Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kematian Terhadap Perempuan	Rasio	3,5				Rasio	3,5			Program Perlindungan Khusus Anak	Bidang Peningkatan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak

VII	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A	Nilai SAKIP DPPKBP3A	Nilai	B							Nilai	B									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat
		Level Menurut SIPP	Level	Level 3							Level	Level 3									Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sekretariat
		Persentase penurunan jumlah temuan SPK oleh laporan keuangan DPPKBP3A	Persent	75%							Persent	75%									Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sekretariat
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persent	80%							Persent	80%									Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sekretariat
																					Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Sekretariat
																					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretariat
																					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat
																					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat
																					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat

Kepala DPPKBP3A



dr. Anna Rahmadia, M.KM
NIP. 198209272008052001

